IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI KECIL TERITIP DI KOTA BALIKPAPAN

Lesti Indriyani¹, Muhammad Zaini², Tonny Hartono³, Enos Paselle⁴, Iman Surya⁵

Email: lestiindri03@gmail.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Mulawarman

Abstract

This study aims to describe and identify the implementation of the policy for the development of Teritip small-scale industries in Balikpapan City based on Mayor Regulation of Balikpapan Number 12 of 2019 concerning the Management of Teritip Small-Scale Industrial Centers. This research employs a qualitative descriptive method using George C. Edwards III's theoretical approach. The findings indicate that policy implementation faces challenges in communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Communication is conducted through online media and internal meetings, emphasizing clear language and business actor participation. However, inconsistencies in policy coordination persist. Infrastructure remains insufficient, and there is a lack of trained human resources. The disposition of SIKT UPTD is positive but relies more on sanctions than incentives. The bureaucratic structure is poorly coordinated due to unclear SOP implementation and inadequate work supervision. Improving the bureaucratic structure and enhancing human resources are essential to support policy effectiveness.

Keywords: Policy, Teritip Small-Scale Industrial Centers, Implementation, Balikpapan.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pengembangan industri dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengembangkan sentra industri kecil dan menengah (IKM). Pelaksanaan pengembangan sentra IKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Pasal 5 ayat (1) dari peraturan tersebut menyebutkan beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan sentra IKM, antara lain: 1. Membangun sentra IKM, 2. Memfasilitasi pembentukan kepengurusan sentra IKM, 3. Meningkatkan kemampuan kegiatan usaha sentra IKM, 4. Mendirikan unit pelayanan teknis untuk mendukung kegiatan sentra IKM.

Pembangunan sentra IKM merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan sentra tersebut. Hal ini dilakukan dengan merelokasi IKM yang tersebar atau menempatkan IKM baru agar pengembangan dan penumbuhan IKM dapat dilakukan secara efisien. Tujuan dari pembangunan sentra IKM adalah untuk meningkatkan pemberdayaan industri kecil dan menengah melalui revitalisasi sentra IKM yang sudah ada, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendorong peningkatan kapasitas produksi dan nilai tambah produk. Contohnya, sebelum pembangunan SIKT, para perajin olahan ikan di Kelurahan Teritip memanfaatkan dapur rumah masing-masing yang tersebar di RT 12 hingga RT 18, sehingga pengawasan sanitasi sulit dilakukan dan biaya distribusi

menjadi tinggi. Melalui proses relokasi, DKUMKMP melakukan pendataan terhadap pelaku usaha, menyelenggarakan sosialisasi mengenai manfaat sentra, serta mengadakan penandatanganan kesediaan pindah. Para pelaku usaha kemudian dipindahkan secara bertahap ke rumah produksi tipe 36 m² yang berada di atas lahan SIKT seluas 6 hektare. Lokasi ini telah dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah, jaringan air bersih dari PDAM, serta akses jalan kolektor yang memadai. Fasilitas bersama seperti ruang pengeringan, cold storage, dan showroom turut membantu menekan biaya produksi hingga 15%. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 27% unit usaha yang belum berpindah ke lokasi sentra karena kendala modal kerja serta keterbatasan transportasi dari tempat tinggal ke lokasi SIKT.

Berdasarkan kondisi saat ini, terdapat banyak potensi di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan pertumbuhan IKM secara efisien dengan cara merelokasi IKM yang tersebar atau menempatkan IKM baru. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui One Village One Product bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas serta inovasi masyarakat dalam pembangunan industri.

Kota Balikpapan melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian (DKUMKMP) telah membentuk dua kawasan sentra industri kecil yaitu sentra industri kecil Sumber (SIKS) dan sentra industri kecil Teritip (SIKT). Tujuan pembangunan SIKT adalah pengelompokan usaha dalam bentuk hasil olahan pertanian dan perikanan, mengsinergikan kegiatan produksi mulai dari bahan baku pengolahan dan pemasaran

dalam satu rangkaian sentra yang mendasarkan kepada hasil komoditi pertanian dan perikanan unggulan di wilayah kecamatan Balikpapan Timur, khususnya diperuntukan bagi industri kecil menengah yang diarahkan untuk memanfaatkan dan membangun keunggulan lokal.

SIKT terletak di jalan Teritip Laut Rt. 8, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan berjarak ± 30 Km dari pusat kota, dengan luas lahan : ± 6 Ha. SIKT dibangun dengan menggunakan sebagian besar anggaran dana alokasi khusus (DAK) fisik dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan disempurnakan, sarana dan prasarannya dengan anggaran pendapatan daerah (APBD) Kota Balikpapan. Dari hasil pengamatan peneliti berdasarkan data keaktifan rumah produksi di SIKT pada tahun 2019 – 2022 terdapat kesenjangan (gap). Pelaku usaha tidak aktif atau tidak optimal dalam kegiatan produksi di rumah produksi.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Sentra Industri Kecil Teritip, dinyatakan bahwa setiap 2 (dua) tahun sekali, dilaksanakan evaluasi pemanfaatan rumah produksi ataupun fasilitas lainnya yang dikerjasamakan. Sejak Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2019 dibuat, sampai dengan sekarang UPTD SIK belum melakukan laporan evaluasi dan progres pengembangan pelaku usaha di SIKT.

Untuk memastikan UPTD SIK berhasil mencapai tujuan sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Urain Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sentra Industri Kecil pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian, perlu adanya implementasi pengembangan SIKT, dengan

kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik, sehingga pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait dapat mengambil langkah-langkah perbaikan, termasuk memperbaiki komunikasi, memberikan bantuan sumber daya, memperkuat disposisi dalam proses kebijakan dan menyederhanakan struktur birokrasi, jika memungkinkan.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana dari hasil penelitian diharapkan diperoleh gambaran potensi dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan SIKT. Menurut Sugiono (2007) “jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, dan jenis data sesuai dengan tujuan penelitian. Lokasi penelitian berada di Kota Balikpapan dengan situs penelitian pada UPTD SIK Kota Balikpapan, di lokasi SIKT, yang terletak di Jl. Teritip Laut Rt. 8, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Fokus dalam penelitian ini ialah implementasi pengembangan SIKT di Kota Balikpapan melalui indikator Implementasi Kebijakan menurut Edward III yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Fokus selanjutnya ialah untuk mengetahui faktor penghambat pengembangan SIKT oleh UPTD SIKT dalam pelaksanaan fungsi UPTD di DKUMKMP Kota Balikpapan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer sebagai data utama selain itu juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung. Data primer didapat dari informan, yaitu Kepala DKUMKMP Kota Balikpapan, Kepala UPTD SIK DKUMKMP Kota Balikpapan,

Kepala Tata Usaha UPTD SIK DKUMKMP Kota Balikpapan, Pengawas Lapangan UPTD SIK DKUMKMP Kota Balikpapan, Fungsional di Bidang Teknologi dan Sumber Daya Industri, DKUMKMP Kota Balikpapan, dan Pelaku Usaha di SIKT.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti merujuk pada pendapat Sugiyono (2017) “Metode observasi, wawancara dan dokumentasi”. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah kajian. Pendekatan kepada informan yang dituju merupakan salah satu cara untuk melakukan evaluasi pada suatu pengelolaan kegiatan. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui problem, halangan dan persepsi stakeholder demi kemajuan kegiatan (Walidin et al., 2015).

Analisis data sangat penting dalam suatu penelitian karena pada tahapan analisis data dilakukan pengorganisasian terhadap data yang berkumpul di lapangan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data Miles and Huberman (1984) dalam sugiyono (2007) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data, terdiri atas data reduction, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sejauh mana implementor (actor) dalam implementasi kebijakan ini dapat menyampaikan isi dari kebijakan pengembangan SIKT berdasarkan Peraturan Walikota No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sentra Industri Kecil Teritip, mulai dari pemahaman sampai dengan penyampaian kepada semua pemangku kepentingan dan kelompok

sasaran sebagai upaya untuk menuju suksesnya kebijakan tersebut.

Dalam komunikasi kebijakan di SIKT tercermin melalui beberapa temuan yang menunjukkan sejalan atau tidaknya pesan yang disampaikan dengan tindakan nyata pelaku usaha di SIKT. Kegiatan pertemuan/rapat persemester menjadi momen efektif untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengembangan SIKT. Temuan tersebut sesuai dengan teori konsistensi dalam komunikasi kebijakan menekankan bahwa konsistensi antara pesan dan tindakan merupakan elemen penting untuk membangun kepercayaan dan keandalan dalam organisasi (Aziz dan Wicaksono 2020). Meskipun terdapat ketidak konsistenan pada intensitas rapat yang perlu penambahan pertemuan/rapat, yang seharusnya dilakukan setiap bulan sekali dan disempurnakan dengan tingkat disiplin kehadiran, kegiatan-kegiatan positif seperti pembuatan laporan, rapat evaluasi, dan kegiatan seremonial dapat memberikan kontribusi untuk menciptakan konsistensi di dalam organisasi. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan konsistensi antara komunikasi kebijakan dan tindakan nyata merupakan langkah penting untuk memperkuat implementasi kebijakan pengembangan SIKT di Kota Balikpapan. Beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan dalam meningkatkan komunikasi dalam aspek konsistensi :

1. Menegaskan tujuan: Penting untuk memastikan bahwa komunikasi mengenai tujuan kebijakan dan strategi pengelolaan SIKT harus jelas dan konsisten. Setiap pihak yang terlibat di SIKT harus memiliki pemahaman yang seragam mengenai visi dan misi yang ingin dicapai ;

2. Koordinasi antar pihak: Konsistensi dalam komunikasi diperlukan antara semua pemangku kepentingan, termasuk DKUMKMP, UPTD SIK, pengelola rumah produksi di SIKT, masyarakat setempat, dan pihak terkait lainnya. Ini akan membantu mencegah kebingungan dan mendukung kolaborasi yang efektif ;
3. Transparansi : Komunikasi yang konsisten juga mencakup tingkat transparansi yang tinggi. Informasi mengenai perubahan kebijakan, aturan, atau program tertentu haruslah terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak terkait ;
4. Evaluasi dan umpan balik: Implementasi kebijakan harus dikaitkan dengan sistem evaluasi yang konsisten. Umpan balik dari berbagai pihak dapat membantu dalam penyesuaian dan perbaikan kebijakan.

Dengan menjaga konsistensi dalam komunikasi sepanjang proses implementasi kebijakan di SIKT, diharapkan tercapainya pemahaman yang lebih baik, dukungan yang lebih besar, dan hasil yang lebih efektif dalam pengelolaan SIKT di Kota Balikpapan.

Sumberdaya

Implementasi kebijakan memerlukan sumber daya yang memadai dalam berbagai aspek, dan faktor sumber daya tersebut memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut merupakan analisis terhadap beberapa jenis sumber daya yang menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan di SIKT :

1. Sumber daya manusia : Persepsi dan kebutuhan, terdapat kebutuhan tambahan 1 (satu) orang staf di SIKT,

hususnya pengawas lapangan, karena lokasinya yang jauh dari pusat kota. Penambahan staf diharapkan dapat memperkuat pengelolaan SIKT, terutama dalam pengawasan dan pengembangan di SIKT ;

2. Anggaran : Tren anggaran UPTD SIK mengalami fluktuasi, tetapi cenderung meningkat dari tahun 2021-2024. Sumber dana: Pengelolaan anggaran UPTD SIK didukung oleh alokasi APBD Kota Balikpapan. Dana dari Kementerian Perindustrian (DAK Fisik) banyak membantu dalam pembangunan sarana dan prasarana di SIKT ;
3. Fasilitas : Realisasi capaian infrastruktur di SIKT masih belum maksimal. Persepsi pelaku usaha terhadap fasilitas dasar: infrastruktur air bersih: sebagian memerlukan perbaikan atau pasokan PDAM, infrastruktur listrik: mayoritas dianggap sangat baik, infrastruktur jalan: sebagian memerlukan perbaikan, infrastruktur drainase: sebagian memerlukan pembenahan, infrastruktur telekomunikasi: sebagian membutuhkan, terutama internet dan TV kabel. Secara umum persepsi pelaku usaha terhadap fasilitas dasar dianggap baik dan membantu pelaku usaha berproduksi di SIKT ;
4. Informasi dan kewenangan: informasi yang akurat dan relevan dari stakeholder terkait sangat penting dalam mengambil kebijakan di lapangan, Kepala UPTD SIK memiliki kewenangan dari Dinas dan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sentra Industri Kecil Teritip.

Sumber daya memegang peran sentral dalam pelaksanaan kebijakan publik,

mencakup staf yang memadai dengan keahlian yang sesuai. Berdasarkan data temuan di SIKT, terdapat 1 orang pengawas lapangan, 1 orang tenaga administrasi, 3 orang security, 1 orang teknisi mesin/peralatan dan 1 orang tenaga kebersihan. Keterlibatan DKUMKMP dan UPTD SIK dalam memberikan pelatihan dan diklat menunjukkan upaya meningkatkan kompetensi staf. Belum ada pelatihan khusus mengenai pengelolaan sentra industri kecil, untuk mendukung kebijakan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sentra Industri Kecil Teritip.

Disposisi

Dukungan dan sikap para implementor, terutama para pelaksana kebijakan, memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam konteks pengembangan SIKT di Kota Balikpapan, hasil wawancara dengan berbagai informan mengungkapkan berbagai bentuk dukungan dari para implementor :

1. Dukungan dari Kepala DKUMKMP: DKUMKMP secara aktif mendukung pengembangan SIKT. Salah satu wujud dukungan adalah mengusulkan pengangkatan Kepala UPTD SIK yang telah lama menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) ;
2. Dukungan bidang TSDI: bidang TSDI berkomitmen meningkatkan sumber daya manusia di UPTD SIK. Tahun 2024, anggaran DAK Non Fisik digunakan untuk pelatihan SDM bagi pengelola Sentra (SIKT dan SIKS) ;
3. Dukungan dan komitmen Staf UPTD SIK: semua staf di UPTD SIK menyatakan dukungan terhadap implementasi kebijakan pengembangan di SIKT. Staf melakukan penjadwalan bergilir untuk mengawasi pengelolaan di SIKT ;

4. Pengawasan dan Pengendalian Kedisiplinan: absensi manual dan elektronik: pengawasan kedisiplinan staf di SIKT menggunakan absensi manual dan elektronik (finger print) ;
5. Pengawasan rutin dan pelaporan: pengawasan dilakukan secara rutin, setiap hari Selasa dan Kamis, oleh pengawas lapangan di SIKT. Pelaporan pekerjaan dilakukan melalui Whatapps Group UPTD SIK ;
6. Penilaian terhadap komitmen staf: penilaian terhadap komitmen staf di SIKT dianggap cukup baik, dan mereka mampu melaksanakan kebijakan pengelolaan SIKT dengan baik.

Dukungan dan komitmen ini dianggap sebagai faktor positif yang dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan dan mencapai tujuan pengembangan SIKT dengan lebih efektif. Berdasarkan temuan, kecenderungan tingkah laku atau sikap para implementor di SIKT menunjukkan beberapa aspek penting.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan temuan, struktur birokrasi di SIKT terkait implementasi Kebijakan Peraturan Walikota No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sentra Industri Kecil Teritip menunjukkan beberapa aspek kritis. Belum terbentuknya struktur satuan tugas khusus dari instansi terkait dapat menciptakan kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang terbatas hanya menjadi kendala dalam pengelolaan operasional yang lebih kompleks.

Temuan tersebut mengacu pada pemikiran teoritis dari Max Weber bahwa struktur birokrasi menekankan pada kebutuhan akan struktur hierarki yang jelas, pembagian tugas yang tegas, dan aturan yang

terdefinisi dengan baik (Tampubolon, Simanjuntak, and Silalahi 2023). Kesimpulannya, peningkatan struktur birokrasi dengan menetapkan dan mengklarifikasi peran antarposisi, dan mempertimbangkan penambahan posisi aparatur sipil negara, dapat meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam implementasi kebijakan. Diperlukan pula pemberian SOP yang jelas untuk memandu pegawai dalam melaksanakan kebijakan secara konsisten. Menurut hasil penelitian dari Nekwek (2022) keberhasilan struktur birokrasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang tersedia sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pemberian tugas.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Kebijakan Peraturan Walikota No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sentra Industri Kecil Teritip, perlu dilakukan perbaikan pada struktur birokrasi. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi klarifikasi peran antarposisi, dan penambahan sumber daya manusia sesuai kebutuhan. Penerapan SOP yang jelas juga diperlukan untuk memandu pegawai dalam melaksanakan kebijakan secara konsisten. Dengan demikian, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam implementasi kebijakan di SIKT.

Pengembangan dan penerapan SOP sangat bermanfaat dalam struktur birokrasi untuk meningkatkan implementasi pengembangan SIKT. SOP adalah dokumen yang merinci langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas. Berikut adalah beberapa alasan mengapa SOP sangat penting dalam konteks implementasi kebijakan pengembangan di SIKT, diantaranya :

1. Konsistensi implementasi: SOP membantu memastikan bahwa setiap langkah dalam implementasi pengembangan SIKT dijalankan dengan cara yang konsisten. Memberikan panduan yang jelas untuk menjalankan tugas-tugas tertentu sehingga tidak ada interpretasi yang salah atau perbedaan pendekatan antar staf.
2. Efisiensi operasional: SOP membantu meningkatkan efisiensi dengan merinci langkah-langkah yang efektif dan teruji untuk mencapai tujuan tertentu. Mengurangi risiko kesalahan dan kebingungan, yang dapat menghemat waktu dan sumber daya.
3. Peningkatan kualitas: dengan mengikuti SOP, implementasi kebijakan atau program pengembangan dapat dilakukan dengan tingkat kualitas yang lebih tinggi. Memastikan bahwa setiap langkah mematuhi standar dan praktik terbaik yang telah ditetapkan.
4. Pemantauan dan evaluasi: SOP memberikan dasar yang baik untuk pemantauan dan evaluasi kinerja. Membantu dalam menilai apakah implementasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Memfasilitasi identifikasi area perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan.
5. Kepatuhan hukum: SOP dapat membantu memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil selama implementasi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Mengurangi risiko hukum dengan memastikan kepatuhan.

Dalam konteks struktur birokrasi, SOP juga dapat membantu menjembatani komunikasi antara berbagai tingkatan dan unit organisasi. Selain itu, pembuatan SOP

sebaiknya melibatkan stakeholder terkait agar mendapatkan masukan yang berharga dan menciptakan keterlibatan lebih lanjut dalam implementasi. Diperlukan upaya untuk segera menyusun SOP pengelolaan SIKT sebagai panduan operasional yang jelas bagi seluruh staf.

Untuk memperjelas pelaksanaan kebijakan pengelolaan SIKT, diperlukan SOP yang konkret dan aplikatif. Contohnya, SOP *Pengelolaan Rumah Produksi* dapat mencakup: (1) jadwal operasional dan penggunaan fasilitas bersama seperti ruang pengering dan mesin vacuum sealer; (2) prosedur pemeliharaan alat secara berkala oleh teknisi UPTD setiap hari Jumat; (3) mekanisme pelaporan kerusakan fasilitas melalui formulir aduan atau grup WhatsApp resmi; dan (4) jadwal monitoring pelaku usaha aktif oleh pengawas lapangan setiap Selasa dan Kamis. Selain itu, dapat disusun SOP *Penerimaan dan Evaluasi Pelaku Usaha Baru* yang memuat alur mulai dari pendaftaran, verifikasi berkas, survei lapangan, wawancara, hingga penempatan di unit produksi. SOP semacam ini dibutuhkan agar proses pengelolaan berjalan efisien, transparan, dan terukur meskipun belum tertuang secara formal.

Menurut Ramdhani & Ramdhani (2017), pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor seperti komunikasi, sumber daya, dan disposisi, serta harus dievaluasi secara komprehensif—termasuk monitoring on-going—agar akuntabel dan efisien¹. Hal ini sejalan dengan urgensi penyusunan SOP di SIKT, sehingga proses pengelolaan fasilitas dan pelaporan kerusakan yang sudah dijabarkan sebelumnya dapat dievaluasi secara terus-menerus oleh pengawas lapangan. Menurut Aisah, Zaqiah, dan Supiana (2021), penerapan SOP yang sistematis tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga

membentuk tata kelola lembaga yang terarah dan akuntabel. Hal ini menegaskan pentingnya penyusunan SOP operasional di SIKT agar proses pengelolaan, evaluasi, dan pelayanan terhadap pelaku usaha berjalan secara profesional dan konsisten.

Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sentra Industri Kecil Teritip . Berdasarkan, teori implementasi kebijakan George C. Edward III dan pembahasan implementasi kebijakan pengembangan SIKT di Kota Balikpapan, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kurangnya konsistensi dalam komunikasi, terutama dalam pelaksanaan rapat yang dilakukan hanya persemester, dianggap belum optimal ;
2. Kurangnya sumber daya manusia (staf) dari segi kuantitas dan kualitas dalam pengelolaan di SIKT ;
3. Belum dibuatnya SOP dalam pengelolaan di SIKT.

Menurut (Winarno, 2016), ” SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Renggi Tay & Rusmiwari (2019) menemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan sangat ditentukan oleh kesesuaian sumber daya,

kejelasan prosedur, dan partisipasi masyarakat—yang sejalan dengan kondisi relokasi dan pengelolaan IKM di SIKT.

PENUTUP

Berdasarkan uraian data serta analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan :

Implementasi Peraturan Walikota No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sentra Industri Kecil Teritip, sudah di implementasikan, namun belum optimal. Secara umum implementasi kebijakan pengembangan SIKT Kota Balikpapan, dengan pendekatan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dapat diketahui bahwa :

1. Pada aspek komunikasi: dalam aspek tranmisi dan kejelasan, langkah dan strategi pendekatan komunikasi sudah baik. Transmisi dilakukan melalui situs web resmi dan rapat internal, memastikan akses dan partisipasi aktif dari pelaku usaha di SIKT. Kejelasan diperkuat dengan penekanan pada rincian, bahasa yang mudah dipahami, dan partisipasi pelaku usaha di SIKT. Terdapat kelemahan dalam konsistensi, yang tercermin dalam kegiatan pertemuan rapat persemester ;
2. Pada aspek sumberdaya : meskipun realisasi capaian infrastruktur di SIKT masih kurang, namun persepsi pelaku usaha terhadap fasilitas dasar: air bersih, listrik, jalan, drainase dan telekomunikasi: mendukung pelaku usaha berproduksi di SIKT. Tidak ada sumber daya yang terlatih dalam pengelolaan di SIKT. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Memiliki staf yang terlatih dan berkualitas sangat

penting untuk keberhasilan dalam menerjemahkan implementasi pengembangan kebijakan di SIKT ;

3. Pada aspek disposisi UPTD SIK dalam mengembangkan SIKT memiliki disposisi yang baik, tetapi pendekatan kebijakan ini cenderung mengandalkan sanksi daripada insentif positif ;
4. Pada aspek struktur birokrasi: belum ada kejelasan dalam menerapkan pelaksanaan pengelolaan SOP terhadap pegawai, sehingga struktur birokrasi dalam hal pengawasan kerja yang ada di SIKT kurang terkoordinir dengan baik. Diperlukan peningkatan struktur birokrasi dengan klarifikasi peran antarposisi, dan penambahan sumber daya manusia.

Faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Peraturan Walikota No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sentra Industri Kecil Teritip:

1. Konsistensi pertemuan/rapat yang dilaksanakan persemester belum optimal ;
2. Keterbatasan jumlah staf yang berkualitas dan terlatih ;
3. Tidak adanya SOP pada pengelolaan di SIKT.

Saran untuk DKUMKMP, UPTD SIKT agar dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam berbagai aspek yang masih ada di SIKT Kota Balikpapan agar mampu berkembang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya.

REFERENSI

Aisah, H., Zaqiah, Q. Y., & Supiana, A. (2021). Implementasi kebijakan asesmen kemampuan minimum (AKM): Analisis implementasi

kebijakan AKM. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 128-135.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui *One Village One Product*

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 33 tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Urain Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sentra Industri Kecil Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perindustrian

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sentra Industri Kecil Teritip

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal publik*, 11(1), 1-12.

Renggi Tay, D. S., & Rusmiwari, S. (2019). *Implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 8(4), 1-6.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, and Fernando Silalahi. 2023. "Birokrasi & Good Governance."

Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory. FTK Ar-Raniry Press

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.